**IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
DI PROVINSI DKI JAKARTA
(STUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)**

Oleh:

Welly Kusuma Wardani – 14010111130076
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang
Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACTION

The numbers of raw participation number (APK) on SMU and SMK in Jakarta Capital City is high, led the Jakarta Provincial Government made a policy to deal with the issue. The policy is 12 years compulsory study program that regulated by Local Regulation (Perda) DKI Jakarta Province No.8 years 2006 about Education System. The City of Administration of East Jakarta is the top of the list among the other City of Administration in Jakarta on SMU and SMK students dropped out number issues by 1.131 students. Therefore in this research, the author will focus on 12 years compulsory study program implementation in the city administration of East Jakarta.

The implementation of this program is aimed to increase raw participation number (APK) and reduce school dropout rate in the Capital Jakarta. This research use descriptive of qualitative approach and the data collection method is documentation and interviews. The subject of the research is Jakarta Provincial Education Department, Department of Education Middle East Jakarta City Administration, Section of The School District, and Secondary Education.

The analysis of the implementation on this program shows that the success or failure of compulsory study 12 years program in this year really is determined by the organization of implementation and bureaucrat front line. This is due because they have a authority to execute this program and dealing directly with the target group. Apparently the program implementation has good enough achivement based on the structure and tasks of its owned, working mechanism or coordination, human resources, and all financial resources in the organization. But there are several obstacles that still hinder the achievement of the program is the lack of socialize to targets, the fund distribution delays in the beginning every single year, and also a lack of involvement of community organization in this program.

The writer suggested that the obstacles that exist for this could be considered and resolved by the Government of Jakarta especially for organizations implementation. Then for the next research could do research on this program in term of overall policy evaluation of the input, the process, and the result.

Password : the implementation of policy 12 years study.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada UUD 1945 pasal 31, ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu contoh untuk hal tersebut yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar 9 Tahun tercantum dalam peraturan pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No.20 Tahun 2003.

Kemudian sebagai keberlanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, pada tahun 2012 ini Pemerintah Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Adapun payung hukum untuk program PMU ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Salah satu daerah yang telah melakukan program Wajib Belajar 12 Tahun yaitu Provinsi DKI Jakarta. Dimana payung hukum yang mendasari kebijakan ini yaitu Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.” Pasal 16 huruf (f) yang berbunyi ”Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.”

Program Wajib Belajar 12 Tahun ini tentunya perlu dukungan secara finansial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pengimplementasian program ini lebih mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu untuk mendukung terlaksananya program tersebut, sebanyak Rp 9,78 triliun atau 28,93 persen dari APBD DKI 2012 yang mencapai Rp 33 triliun dialokasikan untuk pendidikan.¹

Selain dukungan secara finansial, program ini juga diperlukan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau birokrat lainnya yang terlibat langsung dalam program ini. Hal ini seperti yang diungkapkan Fauzi Bowo selaku Gubernur pada tahun 2012 lalu yang menyatakan “Dinas Pendidikan harus bisa membuka akses pendidikan untuk seluruh warga,” kata Fauzi usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di SMA Negeri 89, Cakung, Jakarta Timur, Senin, 16 April 2012.² Sehingga peran Dinas Pendidikan atau birokrat lain yang terlibat disini memang sangat penting untuk dapat memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada warga Provinsi DKI Jakarta.

Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan masih tingginya angka putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu alasan yang membuat adanya pelaksanaan program ini. Berikut adalah data Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2010-2012 dan juga Angka Putus Sekolah tahun 2011/2012 dan 2012/2013 di Provinsi DKI Jakarta yaitu :

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) di DKI Jakarta tahun 2010-2012

No.	Indikator	Satuan	Persen		
			2010	2011	2012
1	Angka Partisipasi Murni (APM)	SMA/SMK	58,75	58,79	59,63
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SMA/SMK	86,72	87,16	87,25
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	SMA/SMK	66,50	66,53	66,57

Sumber : Data Arsip Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

¹ <http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/08/dki-bagikan-kartu-gratis-wajib-belajar-12-tahun>

² www.tempo.co/read/news/2012/04/16/083397389/Jakarta-Siap-Terapkan-Wajib-Belajar-12-Tahun

Tabel 1.2. Angka Putus Sekolah Tingkat SMU dan SMK di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011/2012³

Kabupaten / Kota Administrasi	Jumlah Siswa Tingkat SMU	Jumlah Siswa Tingkat SMK	Jumlah / Total
Kepulauan Seribu	-	-	-
Jakarta Selatan	142	746	888
Jakarta Timur	70	1.061	1.131
Jakarta Pusat	31	214	245
Jakarta Barat	61	433	494
Jakarta Utara	38	307	345
Total	342	2.761	3.103

Sumber : Jakarta Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 1.3. Angka Putus Sekolah Tingkat SMU dan SMK di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012/2013⁴

Kabupaten / Kota Administrasi	Jumlah Siswa Tingkat SMU	Jumlah Siswa Tingkat SMK	Jumlah / Total
Kepulauan Seribu	0	1	1
Jakarta Selatan	63	584	647
Jakarta Timur	84	1.206	1.290
Jakarta Pusat	15	293	308
Jakarta Barat	132	391	523
Jakarta Utara	17	137	154
Total	311	2.612	2.923

Sumber : Jakarta Dalam Angka Tahun 2013

³ <http://jakarta.bps.go.id/flip/jda2012new/files/assets/basic-html/page194.html>

⁴ <http://jakarta.bps.go.id/flip/jda2013/files/assets/basic-html/page198.html>

Dari data tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi presentase yang cukup baik dari tahun 2010 sebesar 86,72%, 2011 sebesar 87,16%, dan 2012 sebesar 87,25%. Kemudian dari kedua tabel angka putus sekolah tingkat SMU dan SMK di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011/2012 dan 2012/2013 juga dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka putus sekolah dari tahun 2011/2012 ke tahun 2012/2013. Dengan terjadinya kenaikan angka APS dan penurunan angka putus sekolah tersebut maka dapat dikatakan juga sebagai keberhasilan dari implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta.

Namun walaupun secara keseluruhan terjadi penurunan angka putus sekolah tingkat SMU dan SMK di Provinsi DKI Jakarta, tetapi nyatanya masih ada beberapa daerah Kota Administrasi yang mengalami kenaikan jumlah angka putus sekolah dari tahun 2011/2012 ke tahun 2012/2013 walaupun implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun sudah berjalan. Dimana daerah yang terlihat paling tinggi dan justru malah mengalami kenaikan angka putus sekolah pada tingkat SMU dan SMK disini yaitu terjadi pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan analisis tentang **“Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Timur”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pada program ini secara khusus untuk mengetahui aktor-aktor atau organisasi implementor yang berperan dalam program ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan publik. Berdasarkan pada teori tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis proses implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Timur apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Dimana dalam pembahasan pada proses kebijakan di bahas mengenai organisasi implementasi yang terlibat di dalamnya. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dimana penulis melakukan penelitian berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

GAMBARAN UMUM

Program Wajib Belajar 12 Tahun ini merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu Program Wajib Belajar 9 Tahun. Dimana Program Wajib Belajar 12 Tahun ini kemudian dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU), dengan payung hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.80 Tahun 2013 tentang Program Menengah Universal (PMU).

Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Program PMU ini merupakan strategi untuk menghadapi meningkatnya penduduk usia produktif di Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari program PMU ini yaitu mempercepat kenaikan Angka partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah saat ini yang baru mencapai 78,7% menjadi sekitar 97% pada tahun 2020.

2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari program PMU ini yaitu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Organisasi Implementasi

Organisasi implementasi atau *implementing agency* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi. *Implementing agency* maksudnya adalah keberadaan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Dilihat dari posisinya, *implementing agency* ini memiliki peran yang sangat vital, sebab lembaga inilah yang akan menjamin kegiatan *delivery mechanism* (mekanisme penyampaian) berjalan lancar. Tanpa *delivery mechanism* yang baik tentu tujuan-tujuan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya tidak akan tercapai.

3.1.1 Struktur

Struktur yang ada di dalam organisasi implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Jakarta dalam lingkup Kota Administrasi Jakarta Timur ini yaitu sifatnya adalah struktur vertikal dan termasuk kedalam kategori *complex structure*. Struktur vertikal maksudnya adalah semua susunan struktur dan pembagian tugasnya itu didasarkan pada hirarki, otoritas, atau rantai komando. Kemudian *complex structure* ini maksudnya adalah implementasian program yang tidak hanya melibatkan satu organisasi saja, tetapi juga banyak organisasi. Adapun organisasi implementasi yang terlibat berhubungan langsung dengan program ini yaitu sebagai berikut :

3.1.1.1 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai tombak dari segala pelaksanaan pendidikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini tentunya memiliki pengaruh bagi keberhasilan maupun kegagalan program Wajib Belajar 12 Tahun. Dalam program Wajib Belajar 12 Tahun ini sendiri, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga sudah memiliki tugas di dalamnya, yaitu antara lain tugas tataran kebijakan atau saat perumusan kebijakan, melakukan sosialisasi untuk program ini, melakukan koordinasi dengan semua aktor yang terlibat, terakhir melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini di lapangan.

Semua tugas yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik semua hanya saja masih ada kekurangannya yaitu kurang maksimalnya dalam melaksanakan tugas sosialisasi untuk program ini. Dimana kurangnya tersebut bisa dilihat dari waktu sosialisasi dan juga media sarana sosialisasi.

3.1.1.2 Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri disini telah memiliki struktur dan telah melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki dengan baik juga. Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur ini telah melakukan sosialisasi mengenai program ini, melakukan koordinasi dengan semua

aktor yang terlibat, melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini, memverifikasi data sekolah dalam hal pengajuan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP, dan terakhir menyalurkan dana BOP kepada sekolah-sekolah.

Semua tugas yang dimiliki oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur ini sudah dilakukan dengan cukup baik hanya saja terkadang tugas dalam penyaluran dana BOP kepada sekolah-sekolah tiap awal tahunnya mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan setiap awal tahun terkadang terjadi keterlambatan pengesahan anggaran dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga penyaluran dana BOP dari Pemerintah pun menjadi terlambat juga.

3.1.1.3 Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan

Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan merupakan aktor di tingkat Kecamatan yang terlibat langsung sebagai aktor dalam implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Administrasi Jakarta Timur ini. Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan itu sendiri telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik yaitu telah melakukan sosialisasi mengenai program ini, melakukan koordinasi dengan semua aktor yang terlibat, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pembinaan dana BOP kepada sekolah, dan terakhir melakukan memverifikasi pendataan pengajuan maupun pertanggungjawaban dana BOP.

Kemudian dalam melaksanakan semua tugasnya disini Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan tidak memiliki hambatan. Jadi sejauh ini semua tugas yang dimiliki dan di jalankan dalam implementasi program ini masih berjalan dengan baik.

3.1.1.4 Satuan Pendidikan atau Sekolah

Sekolah-sekolah yang ada di lingkup Kota Administrasi Jakarta Timur ini sendiri telah memiliki struktur dan telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik juga. Sekolah-sekolah telah melakukan sosialisasi mengenai program ini, memberikan pemahaman kepada orangtua, melakukan koordinasi dengan semua

aktor yang terlibat, menjaga agar tidak ada peserta didik yang putus sekolah, mengusulkan data peserta didik untuk menerima dana BOP, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP.

Namun disini sekolah masih memiliki hambatan tersendiri yaitu pada awal tahun biasanya sekolah terlambat dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Lambatnya pengesahan anggaran dana APBD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap awal tahunnya menyebabkan sekolah juga terlambat menerima dana BOP. Keterlambatan penerimaan dana BOP tersebut itulah yang menyebabkan sekolah harus menunda kegiatan sekolahnya, karena pelaksanaan kegiatan sekolah ini hanya bergantung pada dana BOP yang diberikan pemerintah.

3.1.2 Mekanisme Kerja Atau Koordinasi Antar Unit Yang Terlibat

Untuk mekanisme kerja atau koordinasi aktor yang terlibat di dalam program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Administrasi Jakarta Timur ini sifatnya berjenjang. Dilakukan dimulai dari aktor yang ada paling atas, kemudian kepada aktor yang ada di bawahnya, hingga nanti kepada aktor lagi yang berada paling bawah. Jadi disini mekanisme atau koordinasinya berjenjang atau harus melewati aktor demi aktor yang terlibat terlebih dahulu.

Koordinasi ini dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi program ini di lapangan. Yang mana hal ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat oleh para aktor. Rapat ini ada yang rapat rutin minimal sebulan sekali dan rapat dadakan ini tidak terpaut waktunya atau tentatif, tetapi juga apabila tidak dimungkinkan untuk rapat maka hal tersebut dilakukan melalui telepon atau email.

3.1.3 Sumber Daya Manusia Yang Ada Dalam Organisasi

Sumberdaya manusia memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu organisasi implementasi, karena implementasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumberdaya manusia yang memadai. Sumberdaya manusia inilah nantinya yang merupakan pelaksana dari semua tugas-tugas yang ada dalam program, demi mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh suatu program.

Sumberdaya manusia yang ada dalam program ini bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh para aktor. Dilihat dari kualitas sumberdaya manusia nya yaitu disini para aktor sudah memiliki tingkat pendidikan minimal setingkat SMA, dan ada beberapa yang lulusan D1, D3, S1 maupun S2. Kemudian dilihat dari kuantitas atau jumlah sumberdaya manusia yang tersedia untuk progam ini juga dirasa sudah cukup jumlahnya. Yang mana pembagian jumlah sumberdaya manusia yang ada di setiap Dinas ini sudah diatur sesuai dengan kewenangan tugas yang dimiliki oleh masing-masing Dinas.

3.1.4 Dukungan Finansial Serta Sumber Daya Yang Dibutuhkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyiapkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar 12 Tahun ini. Adapun dana BOP tersebut berasal dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Dana BOP ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk membantu setiap kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga dengan adanya dana BOP ini, masyarakat yang kurang mampu bisa turut terbantu untuk tetap dapat mengenyam bangku pendidikan.

Yang mana besaran untuk dana BOP ini yaitu :

- a. SMA dan MA sebesar : Rp 400.000,-/ bulan / peserta didik
- b. SMKN sebesar :
 1. Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Bisnis dan Manajemen / bulan / peserta didik;
 2. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Pariwisata/Seni / bulan / peserta didik;
 3. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian / bulan / peserta didik.

Namun sayangnya pemberian dana BOP ini masih ada beberapa kekurangan yaitu masih ada beberapa sekolah yang belum tercukupi pelaksanaan kegiatan sekolahnya dengan dana BOP yang ada, karena setiap pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan tiap sekolah pasti berbeda. Kemudian ada keterlambatan penyaluran

dana BOP dari Pemerintah kepada sekolah di awal tahun karena adanya keterlambatan pengesahan anggaran APBD. Terakhir penyetoran dana BOP kepada sekolah swasta tahun 2014 kemarin karena ada beberapa faktor, ini tentunya juga menjadi hambatan bagi sekolah swasta sendiri.

3.2 Peran Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta khususnya Kota Jakarta Timur.

Birokrat garda depan atau yang disebut juga dengan *frontline bureaucrats* atau *street-level bureaucrats*. Mereka ini adalah SDM birokrasi yang secara langsung menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan kebijakan, seperti : mendata kelompok sasaran yang *eligible*, melakukan sosialisasi, mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, memastikan bahwa keluaran kebijakan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran secara benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Aktor yang menjadi birokrat garda depan dalam program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ini yaitu Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dimana aktor ini merupakan aktor yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran yaitu sekolah. Walaupun sebenarnya fokus utama kelompok sasaran dari program ini adalah peserta didik, namun peserta didik disini tidak langsung merasakan atau menerima langsung akan adanya program ini. Jadi disini yang kelompok sasarannya adalah sekolah dengan objek nya yaitu peserta didik.

Yang mana tugas birokrat garda depan ini sangat berpengaruh sekali pada kegagalan maupun keberhasilan suatu program karena merekalah yang langsung berhadapan dengan kelompok sasaran. Adapun tugas-tugas aktor birokrat garda depan tersebut sendiri yaitu :

3.2.1 Memahami Tujuan Kebijakan Yang di Implementasikan

Suatu program tentunya dibuat dengan memiliki tujuan yang bisa memberikan dampak positif tentunya. Namun untuk dapat memahami tujuan program tentu tidaklah mudah. Setiap aktor harus paham benar dengan tujuan

program yang ada, karena bisa saja aktor tersebut salah memberikan persepsi tujuan program yang malah berujung pada sulitnya ketercapaian tujuan program. Maka oleh karena itu, agar suatu implementasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan, maka para birokrat garda depan harus dapat memahami tujuan program ini dengan baik terlebih dahulu.

Adapun tujuan program Wajib Belajar 12 Tahun ini yaitu untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada penduduk usia 16-18 tahun atau peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat. Dengan pemberian kesempatan pendidikan seluas-luasnya, maka tentu nantinya peserta didik dapat lebih mudah mengenyam pendidikan sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah yang juga merupakan menjadi salah satu tujuan program ini.

Secara keseluruhan tugas dalam memahami kebijakan oleh birokrat garda depan dalam program Wajib Belajar 12 Tahun ini sudah terlihat cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu tujuan dari program ini sudah bisa dikatakan berhasil, yaitu tujuan dalam menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta dari tahun 2012/2013 ke tahun 2013/2014. Dengan pemahaman tujuan yang baik tersebut maka tentunya setiap tugas dapat lebih mudah untuk dilaksanakan, dan membuat pencapaian tujuan juga menjadi lebih mudah.

Berikut adalah data putus sekolah di SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2012/2013 dan tahun 2013/2014 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Angka Putus Sekolah SMA Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013

No.	Kecamatan	SMA Tahun 2012/2013						TOTAL
		Sekolah Negeri			Sekolah Swasta			
		I	II	III	I	II	III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pasar Rebo	-	-	-	-	1	1	2
2	Ciracas	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Cipayung	-	-	-	-	-	-	-
4	Makasar	-	-	-	-	-	-	-
5	Kramat Jati	-	-	-	12	12	10	34
6	Jatinegara	8	-	-	-	1	-	9
7	Duren Sawit	7	3	-	1	4	2	17
8	Cakung	7	-	-	-	-	-	7
9	Pulo Gadung	-	-	-	-	1	-	1
10	Matraman	-	-	-	3	-	-	3
Total		22	3	-	16	19	13	73
		25			48			

Sumber : Rangkuman Data SMA dan SMK Tahun 2012/2013
 Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel 3.2

Angka Putus Sekolah SMK Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013

No.	Kecamatan	SMK Tahun 2012/2013						TOTAL
		Sekolah Negeri			Sekolah Swasta			
		I	II	III	I	II	III	
1	Pasar Rebo	-	-	-	25	55	29	109
2	Ciracas	-	-	-	54	46	20	120
3	Cipayung	40	11	-	42	17	4	114
4	Makasar	-	-	-	2	30	4	36
5	Kramat Jati	-	-	-	34	30	10	74
6	Jatinegara	1	-	-	6	9	2	18
7	Duren Sawit	-	-	-	181	204	123	508
8	Cakung	-	-	-	20	69	49	138
9	Pulo Gadung	-	-	-	-	19	8	27
10	Matraman	-	-	-	-	-	-	-
Total		41	11	-	364	479	249	1144
		52			1092			

Sumber : Rangkuman Data SMA dan SMK Tahun 2012/2013
 Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel 3.3**Angka Putus Sekolah SMA Negeri dan Swasta Tahun 2013/2014**

No.	Kecamatan	SMA Tahun 2013/2014						TOTAL
		Sekolah Negeri			Sekolah Swasta			
		I	II	III	I	II	III	
1	Pasar Rebo	-	-	-	-	-	-	-
2	Ciracas	-	-	-	-	-	-	-
3	Cipayung	-	-	-	-	-	-	-
4	Makasar	-	-	-	-	-	-	-
5	Kramat Jati	-	-	-	-	-	-	-
6	Jatinegara	5	-	-	-	-	-	5
7	Duren Sawit	-	-	-	-	-	-	-
8	Cakung	-	-	-	-	-	-	-
9	Pulo Gadung	-	-	-	-	1	1	2
10	Matraman	-	-	-	-	3	-	3
Total		5	-	-	-	4	1	10
		5			5			

Sumber : Rangkuman Data SMA dan SMK Tahun 2013/2014

Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel 3.4**Angka Putus Sekolah SMK Negeri dan Swasta Tahun 2013/2014**

No.	Kecamatan	SMK Tahun 2013/2014						TOTAL
		Sekolah Negeri			Sekolah Swasta			
		I	II	III	I	II	III	
1	Pasar Rebo	-	-	-	10	13	4	27
2	Ciracas	48	17	2	6	27	3	103
3	Cipayung	4	-	-	23	16	3	46
4	Makasar	-	-	-	40	19	8	67
5	Kramat Jati	-	-	-	15	11	2	28
6	Jatinegara	-	-	-	12	6	1	19
7	Duren Sawit	-	-	-	70	32	4	106
8	Cakung	-	-	-	28	25	12	65
9	Pulo Gadung	-	-	-	5	6	-	11
10	Matraman	7	-	-	-	-	-	7
Total		59	17	2	209	155	37	479
		78			401			

Sumber : Rangkuman Data SMA dan SMK Tahun 2013/2014

Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

3.2.2 Melakukan Hubungan dengan Lembaga Lain

Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan yang menjadi birokrat garda depan dalam program ini bertugas sebagai penghubung antara Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan juga dengan sekolah SMA maupun SMK. Dalam hal ini dilakukan dengan cara koordinasi dengan mengadakan rapat pertemuan. Koordinasi rapat ini ada yang bersifat rapat rutin maupun rapat dadakan. Yang mana rapat rutin ini yaitu dilakukan minimal sebulan sekali dan rapat dadakan ini yaitu dilakukan apabila ada kebutuhan mendadak mengenai program ini. Atau jika tidak memungkinkan untuk rapat, hal dadakan ini akan dikoordinasikan lewat telfon atau email.

Untuk kunjungan evaluasi dan monitoring ke sekolah-sekolah ini hampir rutin setiap bulan dilakukan oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan. Dimana hal ini untuk melihat dan mengetahui langsung seperti apa kegiatan belajar mengajar, kegiatan sekolah, dan kegiatan implementasian program ini lainnya di sekolah. Kemudian untuk melakukan hubungan dengan lembaga lainnya seperti LSM, BPK, KPK, dan Inspektorat lainnya itu sendiri disini Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan sendiri tidak memiliki tugas untuk melakukan hal tersebut.

3.2.3 Menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran.

Dalam program Wajib Belajar 12 Tahun ini, penyampaian informasi oleh aktor birokrat garda depan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi. Yang mana sosialisasi ini dilakukan dengan cara rapat-rapat yang di adakan. Sebenarnya Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan sebagai aktor birokrat garda depan ini sendiri disini tidak memiliki kewenangan dan tugas yang khusus dalam memberikan sosialisasi kepada sekolah, karena sebenarnya tugas sosialisasi program ini ke sekolah sudah menjadi tugas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan tugas Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur itu sendiri.

Sehingga tugas birokrat garda depan dalam hal penyampaian informasi atau sosialisasi ini kepada sekolah-sekolah sedikit kurang maksimal dikarenakan

memang mereka tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk itu. Tetapi walaupun begitu jika ada rapat atau pertemuan dengan sekolah-sekolah, terkadang birokrat garda depan atau Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan disini juga suka menyelingi untuk memberikan informasi mengenai program ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Timur diatas maka dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan program yang sangat baik untuk terus di implemantasikan. Hal tersebut dikarenakan program ini memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada peserta didik usia 16-18 tahun untuk dapat mengenyai pendidikan di tingkat SMA, SMK maupun MA. Yang nantinya hal tersebut membantu untuk meningkatkan angka APK, APM, dan menurunkan angka putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

Yang mana keberhasilan maupun kegagalan program ini sebenarnya sangat ditentukan oleh para aktor atau implementor dalam program ini, karena mereka lah yang bertugas langsung dalam melaksanakan program ini. Baik dilihat dari organisasi implementasi nya maupun dilihat dari birokrat garda depan nya.

Dilihat secara keseluruhan dari organisasi implementasi yang ada sudah bisa dikatakan cukup baik dilihat dari struktur yang ada, tugas yang telah dilaksanakan, koordinasi yang dijalankan, sumberdaya manusia yang dimiliki dan dukungan finansial yang diberikan. Dari segi struktur yang ada semua implementor sudah memiliki kejelasan struktur nya masing-masing, sehingga tugas yang dimiliki oleh para aktor pun juga jelas. Dengan begitu pelaksanaan semua tugas akan lebih mudah.

Namun sayangnya di dalam pelaksanaan ini masih ada kekurangan yang terjadi di dalamnya. Kekurangan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para aktor dan juga masalah dana BOP kepada sekolah swasta yang sempat terhenti pada tahun 2014 karena ada beberapa faktor.

Kemudian untuk birokrat garda depan ini sendiri merupakan implementor yang cukup penting juga dalam program ini karena aktor birokrat garda depan ini

merupakan aktor yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran. Adapun aktor birokrat garda depan dalam program ini yaitu Seksi Dinas Pendidikan Menengah Pendidikan Kecamatan.

Secara keseluruhan birokrat garda depan dalam program ini sudah cukup baik dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya. Yaitu birokrat garda depan disini sudah cukup bisa memahami tujuan kebijakan program yang ada, kemudian sudah melakukan hubungan dengan aktor lain, sudah menyampaikan informasi program ini kepada kelompok sasaran. Walaupun penyampaian informasi kepada kelompok sasaran ini tidak dilakukan dengan maksimal karena birokrat garda depan tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk itu. Tetapi aktor birokrat garda depan disini terkadang tetap menyampaikan informasi program ini kepada kelompok sasaran apabila ada pertemuan maupun rapat.

4.2 Saran

Dari pembahasan yang ada mengenai program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta studi kasus Kota Administrasi Jakarta Timur, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh para aktor belum maksimal, baik secara waktu dan juga sarannya. Dilihat dari waktunya yaitu sosialisasi untuk program ini hanya dilakukan sekali dalam setahun saja terutama kepada orangtua peserta didik saat awal ajaran baru oleh sekolah. Kemudian dilihat dari sarannya yaitu sosialisasi masih dilakukan dengan cara rapat-rapat saja, dan belum terlalu gencar dilakukan di internet maupun spanduk. Kemudian semua aktor seharusnya diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan tugas sosialisasi ini, tidak hanya beberapa aktor saja yang melakukan tugas ini. Sehingga sosialisasi program ini nantinya bisa lebih maksimal dan bisa lebih dipahami baik oleh para aktor yang ada maupun oleh masyarakat juga tentunya.

2. Menambahkan besaran dana BOP

Terbatasnya dana BOP yang disediakan oleh Pemerintah ini juga merupakan salah satu kendala bagi pelaksanaan program ini di lapangan. Hal tersebut

dikarenakan ada beberapa sekolah yang merasa belum tercukupinya dana BOP yang ada untuk mengcover semua kegiatan yang ada di sekolah. Padahal sekolah hanya mengandalkan pelaksanaan kegiatan sekolah dari dana BOP tersebut dan tidak lagi diperbolehkan memungut dana apapun dari orangtua peserta didik.

3. Ketepatan waktu penyaluran dana BOP

Pengesahan APBD setiap awal tahun yang kadang terlambat ini menyebabkan penyaluran dana BOP dari Pemerintah kepada sekolah-sekolah juga menjadi terlambat. Keterlambatan itu akhirnya membuat penerimaan dana BOP oleh sekolah pun menjadi terlambat. Sehingga pelaksanaan semua kegiatan sekolah juga menjadi terlambat. Hal ini dikarenakan semua pelaksanaan kegiatan sekolah sekarang ini hanya bergantung kepada dana BOP dan sekolah dilarang untuk memungut dana apapun dari orangtua peserta didik.